

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERMINAL KIJING PONTIANAK

Nawang Calistya Sari

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jl.
RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Depok, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 12450
Email: Nawangcs@upnvj.ac.id

Tauiqqurrahman

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jl.
RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Depok, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 12450
Email: tauiqqurrahman@upnvj.ac.id

Abstrak

Pemerataan pembangunan di semua wilayah Indonesia melalui Program Strategis Nasional merupakan salah satu usaha pemerintah untuk mengembangkan sarana dan prasarana dalam mendukung perkembangan berbagai bidang. Salah satu Program Strategis Nasional yakni Terminal Kijing di wilayah Kalimantan Barat. Adapun pihak dalam pembangunan Terminal Kijing yaitu Pelindo II (Persero) selaku pihak pengguna jasa serta PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. selaku pihak penyedia jasa. Dalam menjalankan hubungan kontraktual antara kedua pihak tersebut diatur dalam sebuah perjanjian yang disepakati oleh semua pihak. Tetapi, pada perjanjiannya terdapat permasalahan, yaitu penghentian pekerjaan oleh masyarakat nelayan dan pemilik tanah terkait pembebasan lahan yang belum terselesaikan oleh pihak pengguna jasa sehingga merugikan pihak penyedia jasa baik dari segi waktu, biaya sewa alat hingga pekerja dalam pengerjaan pembangunan Terminal Kijing. Artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif deskriptif. Penghimpunan data diperoleh melalui studi dokumen serta studi pustaka. Analisa data dilaksanakan melalui metode deskriptif kualitatif. Perlu dikaji lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban hukum para pihak dalam perjanjian pelaksanaan konstruksi antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan PT Wijaya karya (Persero) Tbk. dalam pelaksanaan pembangunan Terminal Kijing dan upaya yang harus dilakukan atas keterlambatan pembayaran ganti rugi lahan oleh pengguna jasa dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan Terminal Kijing Kalimantan Barat. Semestinya PT Pelindo II menyelesaikan proses pengadaan tanah sebelum pembangunan Terminal Kijing oleh PT Wijaya

karya, kemudian PT Wijaya Karya seharusnya memastikan terlebih dahulu pembebasan lahan untuk pembangunan terminal kijing telah diselesaikan, dan sebaiknya telah menyelesaikan pembebasan lahan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati pasca ditanda tangannya kontrak.

Kata-Kunci: Tanggung Jawab Para Pihak, Infrastruksur, Terminal Kijing

Abstract

Equitable development in all regions of Indonesia through the National Strategic Program is one of the government's efforts to improve facilities and infrastructure to support the development of various fields. One of the National Strategic Programs is Kijing Terminal in West Kalimantan. The parties in the construction of the Kijing Terminal are Pelindo II (Persero) as the service user and PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. as a service provider. In carrying out the contractual relationship between the two parties, it is regulated in an agreement agreed upon by both parties. However, in the agreement, there are problems, namely the termination of work by fishing communities and landowners related to the land acquisition that has not been resolved by the service users, thus harming the service providers both in terms of time, equipment rental costs, and workers in the construction of Kijing Terminal. This research uses descriptive normative legal research. Data collection was obtained through literature study and document study. Data analysis was carried out in a qualitative descriptive manner. It is necessary to further study the legal responsibilities of the parties in the construction implementation agreement among PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. in the implementation of the construction of the Kijing Terminal and the efforts that must be made for the late payment of land compensation by service users in the agreement for the construction work of the West Kalimantan Kijing Terminal. PT Pelindo II should have completed the land acquisition process before the construction of the Kijing Terminal by PT Wijaya Karya, then PT Wijaya Karya should ensure that the land acquisition for the construction of the Kijing terminal has been completed, and should have completed the land acquisition by the agreed contract after signing the contract.

Keywords: *Responsibilities of the Parties, Infrastructure, Kijing Terminal*

PENDAHULUAN

Sejak kurun waktu tahun 2014 hingga saat ini pemerintah telah banyak melakukan pembangunan diberbagai bidang, baik di sektor SDM



serta sarana prasarana termasuk infrastruktur.¹ Bidang infrastruktur pemerintah menetapkan Pepres No. 58 Tahun 2017 mengenai Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Berdasarkan Pepres tersebut ada 248 proyek yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya proyek pembangunan Terminal Kijing,

Proyek pembangunan Terminal kijing ini juga dituangkan dalam Perpres Nomor 43 Tahun 2017 mengenai Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat. Dalam hal ini Pemerintah memberikan wewenang kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dalam pembangunan serta pengoperasiannya. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia juga menjelaskan bahwa Terminal Kijing merupakan bagian dari Pelabuhan Utama Pontianak yang direncanakan dapat berfungsi sebagai pelabuhan utama dan dapat melayani rute domestik serta pelayaran internasional.²

Sebelum pelaksanaan pengerjaan pembangunan Terminal Kijing dilakukan perjanjian diantara penyedia serta pengguna jasa, Adapun pihak pada pembangunan konstruksi menurut UU No. 2 Tahun 2017 mengenai Jasa Konstruksi (UUK) yaitu ada pengguna jasa, penyedia jasa serta sub penyedia jasa bahwa Penyedia jasa merupakan badan atau orang perseorangan yang aktivitas bisnisnya bertugas memberikan jasa pembangunan sedangkan, Pengguna jasa merupakan badan atau individu personal selaku pemilik/ pemberi pekerjaan atau proyek yang membutuhkan jasa pembangunan.³

Pembangunan Proyek Terminal Kijing Mempawah terdapat hubungan antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai pengguna jasa serta PT Wijaya karya (Persero) Tbk. selaku penyedia jasa dimana adanya suatu perikatan oleh seluruh pihak. Wujud ikatan meliputi aktivitas sektor jasa pembangunan tersebut yang disebut dengan sebutan perjanjian konstruksi atau kontrak konstruksi yang di negara barat disebut dengan sebutan construction agreement atau construction contract.⁴ Perjanjian pekerjaan konstruksi atau kontrak konstruksi mengatur keterikatan hukum diantara semua pihak yang diikat berdasarkan kesepakatan konstruksi.

¹ Andrew Timothy, I Wayan Wiryawan, Ni Putu Purwanti, "Pertanggungjawaban Hukum Bagi Penyedia Jasa Konstruksi Dan Pengguna Jasa Konstruksi Dalam Gagal Bangunan," *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 3 No. 2, Oktober, 2017, h.2.

² Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup, *Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak*, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II, Pontianak, 2017.

³ Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, h.595.

⁴ Nazarkhan Yasin, *Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, h.1.

Perjanjian konstruksi adalah gabungan maupun bagian aktivitas yang termasuk jasa membangun, mengoperasikan, memelihara, membongkar, serta membangun kembali suatu gedung hingga proyek tersebut bisa terselesaikan dengan baik.⁵ Pelaksanaan pembangunan Terminal Kijing berdasarkan kebijakan undang-undang serta tidak berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Sebagaimana termuat dalam cnbcindonesia.com bahwa kontrak konstruksi antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. dituangkan dalam perjanjian pelaksanaan Pekerjaan dengan yang ditandatangani pada tahun 2018 dengan nilai berkisar 2,7 triliun rupiah dan berbentuk lumpsum.⁶ Lumpsum merupakan kontrak jasa untuk menuntaskan semua tugas yang diusulkan turut dengan kualifikasi yang ditentukan (bentuk bangunan, detail, jadwal, serta seluruh kualifikasi sesuai dengan dokumen lain) dalam batas waktu yang telah ditentukan dengan jumlah harga yang pasti, spesifik dan disepakati secara tegas, yang disepakati sebelum memulai suatu pekerjaan. Pengguna jasa menyanggupi pembayaran biaya atas pekerjaan yang diselesaikan yang sesuai permintaan dengan metode pembayaran yang disepakati dengan pihak penyedia jasa.⁷ Tenggat waktu pengerjaan jasa ditetapkan sejak diterbitkan Berita Acara Mulai Kerja yang disertai dengan ijin lingkungan dan ijin pembangunan.

Penuntasan pengerjaan sebuah proyek bisa terselesaikan sejalan dengan mutu atau kualitas, dana, serta tenggat waktu jika difasilitasi dengan metode pengerjaan yang baik yang berguna untuk menghasilkan metode kerja yang sesuai seturut profesi.⁸ Tetapi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Konstruksi di lapangan terjadi beberapa kendala yang timbul diluar prediksi para pihak.⁹ salah satunya terkait penghentian pekerjaan oleh masyarakat nelayan dan pemilik tanah terkait pembebasan lahan yang belum terselesaikan oleh pihak pengguna jasa akibat dari aksi tersebut, warga

⁵ Afifah Safira, Anan Chandrawulan, Pupung Faisal, "Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Selama Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum Doctrinal* Vol 6.No. 1, 2021, h.104.

⁶ Ray, "Proyek Terminal Kijing di Pelabuhan Pontianak Butuh Rp 14 T", *CNBC Indonesia*, July, 2018,

⁷ Fitri Yanni Dewi Siregar, Sunarmi, Mahmul Siregar, Detania Sukaraja, "Tanggung Jawab Penyedia Jasa Konstruksi Terkait Kegagalan Konstruksi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah", *USU Law Jurnal* Vol. 7 No. 5, 2019, h. 47-48.

⁸ Etika Christin Onibala Revo L.Inkiriwang, Mochtar Sibi, "Metode Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Dalam Proyek Pembangunan Sekolah SMK Santa Familia Kota Tomohon", *Jurnal Sipil Statik* Vol. 6 No.11, 2018, h. 927.

⁹ Yushar, "Tanggung Gugat Kontraktor dalam Kegagalan Bangunan", *Media Iuris* Vol.2 No. 3, 2019, h.409.



sekitar memberhentikan seluruh aktivitas Pekerjaan di lapangan sampai adanya kejelasan dari PELINDO II atas tuntutan penggantian segala kerugian akibat lahan mereka yang diambil untuk pelaksanaan Pekerjaan.

Mengacu terhadap uraian latar belakang yang disajikan tersebut, oleh sebab itu Penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagaimana di bawah ini:

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum seluruh pihak pada kesepakatan pelaksanaan konstruksi antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. dalam pelaksanaan pembangunan terminal kijing?
2. Bagaimana upaya yang harus dilakukan atas keterlambatan pembayaran ganti rugi lahan oleh pengguna jasa?

METODE PENELITIAN

Artikel ini memanfaatkan riset hukum normatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penghimpunan data melalui studi literatur dan studi dokumen. Dengan pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan kasus (The Case Approach) pendekatan ini dilaksanakan lewat mengkaji seluruh kebijakan perundang-undangan yang terkait permasalahan hukum yang sedang diteliti, Pengolahan data dilakukan melalui seleksi data, dan kompilasi data. Analisa data dilaksanakan melalui metode deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

Tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian pelaksanaan konstruksi antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. dalam pelaksanaan pembangunan Terminal Kijing

Berdasarkan Pasal 3 dalam UUK kontrol relasi kerja diantara penyedia dengan pengguna jasa tertuang pada perjanjian konstruksi, yang memuat hak serta kewenangan yang sama, hak pengguna jasa dalam mendapatkan jasa pembangunan serta tanggung jawab untuk mengikuti persyaratan yang disepakati beserta hak-hak penyedia jasa untuk mendapatkan informasi serta biaya jasa dan tanggung jawab untuk menuntaskan jasa pembangunan.

Tanggung jawab hukum pengguna jasa konstruksi yang terdapat UU Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 bahwa konsumen produk maupun jasa merupakan oknum yang berhak menggunakan produk maupun jasa milik instansi, kementerian, dan negara. Jika mereka tidak menjalani tanggung jawabnya dalam proses pendanaan yang harus mereka bayarkan

bagi pemerintah, mereka bertindak atas nama negara.¹⁰ Menurut ketentuan UUK No. 2 Tahun 2017, penyedia jasa harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang diatur dalam kontrak, termasuk kewajiban-kewajiban terkait yang diatur dalam kontrak.¹¹

Dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, Penyedia jasa harus melaporkan hasil kerjanya dengan sesuai dengan waktu, kualitas, serta dana yang terdapat di perjanjian kerja pembangunan. Apabila penyedia jasa tidak melaporkan hasil kerjanya dengan tepat waktu, kualitas, maupun biaya maka bisa dijatuhkan sanksi ganti rugi sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian jasa pembangunan.¹² Berkaca pada hak serta tanggung jawab sebagaimana yang diatur dalam perjanjian Terminal Kijing Mempawah dalam pelaksanaannya Pelindo II sebagai pengguna jasa ada hak serta tanggung jawab yang wajib diikuti Para Pihak. Salah satu tanggung jawab pengguna jasa adalah menyerahkan penggunaan area untuk pelaksanaan Pekerjaan yang akan terdapat pada Berita Acara Serah Terima Lokasi/Lapangan Tahap I (“BASTL I”).

Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan terhitung sejak dikeluarkannya BAMK sehingga waktu pelaksanaan Pekerjaan bagi Penyedia jasa waktu yang telah ditentukan sejak di keluarkan BAMK tersebut. Pada kenyataannya penyedia jasa seharusnya bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaannya. Namun dalam hal ini pengguna jasa atau owner tidak menyerahkan lahan itu secara *clean and clear*, dengan begitu pengguna jasa tidak bertanggung jawab secara baik sehingga berpotensi menimbulkan masalah.

Dalam pelaksanaan pekerjaan, terdapat penolakan atau demonstrasi dari warga setempat atau pemilik lahan, yaitu seperti yang diberitakan dalam situs kompas.com bahwa ratusan nelayan meminta ganti rugi yang layak kepada Pelindo II mengenai efek konstruksi Pelabuhan Internasional Kijing di Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.¹³ dengan adanya demonstrasi yang dilakukan menyebabkan terganggunya pekerjaan. sehingga dari pihak Wika melakukan kebijakan melakukan Penghentian Pekerjaan sementara. hal ini disebabkan aksi

¹⁰ Tamatompol Marviel Richard, “Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penyedia Jasa Dan Pengguna Jasa Konstruksi Menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi”, *Lex crimen* Vol. 6 No. 3, 2017, h. 4.

¹¹ Filiberto J.D. Rengkung, “Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penyedia Barang Dan Jasa Dalam Pelaksanaan Jasa Konstruksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi”, *Jurnal Lex Crimen* Vol. 6 No. 9, 2017, h. 126.

¹² Pasal 54 UU No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

¹³ Hendra Cipta, ” Ganti Rugi Pelindo II Tak Sesuai, Nelayan Korban Pembangunan Pelabuhan Kijing Geruduk Kantor Gubernur Kalbar”, *Kompas.com*, Mei 2019.



demonstrasi dilakukan pada warga mengancam untuk menghentikan kegiatan operasional Pekerjaan.

Jika ditinjau lebih jauh lagi, adanya keterlambatan ganti rugi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa sehingga menyebabkan demonstrasi yang berdampak kepada Penyedia Jasa. Selain itu menimbulkan keterlambatan durasi pengerjaan pembangunan dengan berhentinya seluruh kegiatan pelaksanaan Pekerjaan yang berpotensi kepada waktu penyelesaian Pekerjaan menjadi mundur. Serta penambahan jam tenaga kerja dan sewa-menyewa peralatan pekerjaan berhentinya kegiatan pekerjaan berdampak juga kepada tenaga kerja dan sewa-menyewa peralatan selama pelaksanaan Pekerjaan, penambahan biaya pekerjaan terhambatnya waktu pelaksanaan dan idle alat di lapangan berpotensi terhadap bertambahnya biaya Pekerjaan yang sudah direncanakan. Potensi ini bisa timbul dari sewa-menyewa alat dan tenaga kerja yang sudah disiapkan oleh penyedia jasa sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.

Dengan penjelasan di atas menunjukkan adanya tanggung jawab pengguna jasa yang belum terpenuhi kepada warga sekitar yaitu pembayaran ganti rugi atas pelaksanaan pekerjaan yang berdampak pada demonstrasi dan menyebabkan pelaksanaan pekerjaan berhenti serta berpotensi menimbulkan kerugian bagi penyedia jasa berupa waktu pelaksanaan dan biaya produksi. Dengan begitu Pengguna Jasa belum melakukan prinsip iktikad baik dalam berkontrak. Dalam hal ini Pengguna Jasa belum melaksanakan tanggung Jawab sesuai dengan ketentuan Kontrak Konstruksi. Menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara mengatakan seluruh kesepakatan wajib dilakukan dengan iktikad baik. Hal ini bisa diartikan bahwa seluruh orang yang merancang suatu kesepakatan harus dilakukan dengan itikad baik.¹⁴

Dalam proses pembuatan Kontrak Konstruksi harus melalui tahapan yang berhubungan dengan asas iktikad baik dalam berkontrak, pentingnya itikad baik pada tingkatan-tingkatan berkontrak yaitu:

- a. Itikad baik merupakan kejujuran yang dimiliki para pihak yang memiliki arti yaitu Pengguna jasa mempunyai kewajiban dalam menerangkan fakta material sebaliknya Penyedia Jasa mempunyai kewajiban dalam mempelajari fakta material sebelum para pihak mengesahkan perjanjian
- b. Pelaksanaan kontrak adalah pengaplikasian hak serta tanggung jawab yang dilaksanakan oleh para pihak berdasarkan kesepakatan yang sudah disetujui dalam perjanjian. Manfaat dalam beritikad baik yang utama yakni terkait dengan kegunaan untuk memberikan batasan menghilangkan serta menambah kewajiban kontraktual. Kegunaan

¹⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1996, h. 41.

tersebut tidak diperbolehkan untuk dilakukan langsung, kecuali jika ditemukan alasan yang sangat kuat menurut keputusan hakim. Batasan tersebut bisa dilaksanakan jika sebuah klausula tidak bisa dijalankan karena tidak adil.

Berdasarkan penjelasan diatas yakni dapat memperkuat prinsip dari asas itikad baik yang mana merupakan keadilan/kepatutan serta kejujuran yang berarti amanah, keterbukaan, otonomi, kepatuhan, tidak ada tindakan memaksa maupun manipulasi. Sesungguhnya prinsip itikad baik memiliki sifat permanen serta konstan. sebaliknya arti dari itikad baik bersifat berubah-ubah serta selalu mengikuti perkembangan atas kesadaran hukum penduduk yang dinamis serta kompleks.¹⁵ Dalam Kontrak Kerja Konstruksi ini sendiri itikad baik dapat menjadi tolak ukur memiliki fungsi asas itikad baik yakni sebagai menjadi sumber dalam aturan hukum.¹⁶

Kemudian Berdasarkan Pasal 3 huruf (b) UUKJ bahwa Penyelenggara Jasa Konstruksi memiliki tujuan dalam menciptakan tata tertib dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan dengan jaminan pemerataan penyedia serta pengguna jasa dalam melaksanakan hak serta kewajibannya dan menambah ketaatan terhadap kebijakan dan ketentuan undang-undang.¹⁷ Sehingga dapat ditafsirkan bahwa selama penyelenggaraan pekerjaan konstruksi baik Pengguna jasa maupun Penyedia jasa harus melakukan hak serta tanggung jawab yang dilandasi dengan kepatuhan yang tertuang dalam Kontrak Konstruksi serta menaati ketentuan undang-undang yang ada. Serta menjalankannya dengan prinsip dan asas itikad baik¹⁸

Upaya yang harus dilakukan atas keterlambatan pembayaran ganti rugi lahan oleh pengguna jasa

Bagi penyedia jasa, tindakan demonstrasi yang terjadi pada pelaksanaan pembangunan Terminal Kijing dapat menghambat kewajiban penyedia jasa untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, dan bahkan dapat meningkatkan biaya jasa yang ditanggung oleh penyedia jasa. Mengingat

¹⁵ Barnabas Dumas Manery, "Makna Dan Fungsi Itikad Baik Dalam Kontrak Kerja Konstruksi", *SASI* Vol. 23 No. 2, 2017, h. 147.

¹⁶ Novalia Arnita Simamora, Tan Kamello, Rosnidar Sembiring, Jelly Leviza, "Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Pendahuluan (voor overeenkomst) Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah", *USU Law Journal* Vol. 3 No. 3, 2015, h.89.

¹⁷ Rudi Effendy Siregar, "Tinjauan Yuridis Atas Kontrak Pengadaan Barang Dalam Pembuatan Jalan Raya Antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Lawas Utara dengan PT. Putra El Khoir", *Skripsi Universitas Sumatera Utara*, 2018, h. 45.

¹⁸ Deviana Yuanitasari, Hazar Kusmayanti, "Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual", *Acta diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* Vol. 3 No. 2, 2020, h. 297.

penyedia jasa menunda penyelesaian pekerjaan pada tenggat waktu yang diputuskan pada kontrak konstruksi, maka penyedia jasa akan dikenakan denda.

Perlu diperhatikan bahwa tindakan Penyedia Jasa ialah menginformasikan atau melaporkan segala bentuk peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lapangan salah satunya seperti aksi demonstrasi yang terjadi di area Pekerjaan sehingga menyebabkan pelaksanaan pekerjaan terhenti, oleh karena itu Penyedia Jasa diharapkan dapat meminta arahan dari Pengguna Jasa terkait pelaksanaan Pekerjaan tetap dapat dilaksanakan atau dihentikan untuk sementara waktu.

Dengan demikian, Penyedia Jasa berhak untuk mengajukan ganti rugi atas pemberhentian Pekerjaan yang dilakukan warga sekitar oleh Pengguna Jasa.

Dari segi ganti rugi dalam Pasal 1365 jo Pasal 1366 jo Pasal 1367 juga dinyatakan meniadakan berikut:

“Seluruh aktivitas yang bertentangan dengan hukum yang menyebabkan kerugian untuk individu lain karena dia menimbulkan kerusakan karena kesalahannya, bertanggung jawab atas kerugian itu.”

"Semua individu memberikan pertanggungjawaban akan seluruh kerusakan yang disebabkan dari tindakan serta kerusakan yang ditimbulkan dari kecerobohan atau kelalaian”

“Setiap orang tidak hanya memberikan pertanggungjawaban atas kerusakan yang ditimbulkan dari perbuatan pribadi namun juga kerusakan yang ditimbulkan oleh perlakuan individu lain yang merupakan tanggung jawabnya atau ditimbulkan dari benda-benda yang ada di bawah kekuasaannya.”

Materi konten di atas merupakan penafsiran bahwa pengguna jasa melakukan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan kontrak konstruksi. Menurut M.A. Moegni Djodirdjo ditugaskan untuk sisi aktif dan pasif. Maksudnya adalah jika ia melakukan suatu perbuatan yang dengan sengaja merugikan orang lain, maka frasa “sengaja melakukannya” dapat diartikan sebagai sisi aktifnya, tetapi jika ia “tidak melakukannya” atau “sengaja diam” dapat dikatakan menjadi, dan Diam adalah sesuatu yang merugikan orang. yang lain adalah sisi pasif.¹⁹

M.A. Moegni Djodirdjo berpendapat bahwa Pasal 1365 memuat tanggung jawab atas tindakan bertentangan dengan hukum, baik melalui sikap positif (*culpa in committendo*) maupun dikarenakan kelalaian (*culpa in ommittendo*), tetapi berbeda dengan Pasal 1366 memuat tentang

¹⁹Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum, Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Bandung: Mandar Maju, 2000, h.13.

tanggung jawab karena kesalahan atas kelalaian (onrechtmatige nalaten) atau bisa juga dikatakan melalaikannya secara onrechtmatig.²⁰

Pasal-pasal yang mencakup tanggung jawab atas tindakan melawan hukum ialah Pasal 1365 KUH Perdata dan 1366 KUH Perdata. Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa semua tindakan ilegal yang menyebabkan kerugian untuk individu lain mengharuskan individu yang menyebabkan kerusakan untuk mengganti kerugian.²¹ selain itu, Pasal 1366 KUHPerdata menerangkan bahwa semua orang tidak hanya memberikan pertanggungjawaban atas kerusakan yang disebabkan dari perbuatannya, namun juga kerusakan yang ditimbulkan dari kecerobohan atau kelalaiannya.²²

Pada keputusan tingkat kasasi, Hoge Raad mengatakan bahwa tindakan yang bertentangan dengan hukum tidak hanya berarti tidak menaati hukum tertulis sebagaimana yang ia tafsirkan pada saat itu, tetapi setiap perbuatan juga mengandung perbuatan melawan hukum.²³

- a. Tidak selaras dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. melawan hak subjektif individu lainnya
- c. melawan norma susila;
- d. tidak selaras dengan unsur kepatutan, ketelitian serta perilaku kewaspadaan yang mengharuskan individu untuk memperoleh hal tersebut dalam pergaulannya sesama warga negara maupun atas kekayaan materi individu lainnya.

Berdasarkan penafsiran dari Pasal 1365 KUHPerdata bahwa maksud dari kaidah tersebut ialah guna menyerahkan ganti rugi. Maka demikian keadilan yang dimaksud adalah sebuah bentuk keadilan yang bersifat memperbaiki/ corrective yang berfokus pada perbaikan atau penggantian kerugian.²⁴

Pasal 1365 KUH Perdata juga mengemukakan bahwa kewajiban pelaku yang melakukan Tindakan perilaku melawan undang-undang dengan membayarkan ganti rugi, sebaliknya kerugian yang di sebabkan oleh wanprestasi telah diatur dengan jelas pada Pasal 1243 KUH Perdata, ganti rugi yang disebabkan oleh tindakan bertentangan dengan hukum tidak

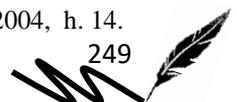
²⁰ Ibid., h.27.

²¹ Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta:Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, h. 300.

²² Ibid., h.304.

²³ Gita Anggreina Kamagi, "Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya", *Lex Privatum* Vol. VI No. 5, 2018, h. 59-60.

²⁴ J. Djohansyah, *Legal Justice, Social Justice dan Moral Justice Dalam Praktek*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Latihan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2004, h. 14.



dijabarkan dengan jelas pada perundang-undangan. Tetapi penggantian kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan wanprestasi bisa diaplikasikan ke dalam tindakan bertentangan dengan hukum²⁵.

Pendekatan secara nyata dalam hukum kontrak ialah pembebanan pertanggungjawaban yang diambil dari kondisi nyata sehingga menghasilkan suatu wujud kesepakatan antara satu sama lain. Pada kenyataannya dalam peraturan umum, ia memberikan pertanggungjawaban dalam keadaan yang nyata yang tidak terdapat wujud kesepakatan, secara nyata sebuah perjanjian memerlukan tindakan antara dua orang atau lebih. Konsep kesepakatan ini dapat disebarluaskan dengan tidak menghalangi individu dalam melakukan gugatan apabila individu tersebut merasa mendapatkan kerugian akibat perbuatan orang lain yang merugikan.²⁶

Demonstrasi yang dilakukan oleh warga sekitar di lokasi pelaksanaan Pekerjaan timbul akibat belum dibayarkan ganti rugi pembebasan lahan oleh Pengguna Jasa kepada warga sekitar karena pelaksanaan Pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam mengikat Kontrak Konstruksi, Pengguna Jasa belum menerapkan prinsip iktikad baik yang menimbulkan kerugian bagi Penyedia Jasa. Maka dari itu artikel ini berpendapat bahwa seluruh kerugian akibat berhentinya pelaksanaan Pekerjaan harus ditanggung sepenuhnya oleh Pengguna Jasa.

Pada tindakan yang bertentangan dengan perundang-undangan ganti rugi adalah hal yang terpenting. Hak dalam penuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh tindakan bertentangan dengan hukum, sebagaimana tercantum pada Pasal 1365 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum yang mengakibatkan individu lainnya dirugikan diwajibkan untuk memberi kompensasi atas kerusakan yang diperbuat. Menurut pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa tidak ada tindakan bertentangan dengan hukum jika tidak ditemukan adanya kerusakan. Pada penetapan ganti rugi akibat tindakan bertentangan dengan hukum dapat diimplementasikan sesuai dengan ketentuan ganti rugi akibat perbuatan wanprestasi. Pitlo menekankan, bahwa secara umum penentuan besarnya ganti rugi yang disebabkan perilaku bertentangan dengan undang undang dengan tidak menerapkan penjelasan pada pasal 1243 KUHPerdara melainkan tertinggi penjelasan pada Pasal 1243 KUHPerdara tersebut dilaksanakan berdasarkan analogi.²⁷

²⁵ Ibid., h.73.

²⁶ P.F.P. Higgins, *Elements of Torts in Australia, Sydney: Buttenvorths*, 1970, h.

²⁷ Ibid.

Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Awal Perikatan, Mariam Darus Badruzaman mencoba menjabarkan secara keseluruhan menjadi:²⁸

- a. Tindakan bertentangan dengan perundang-undangan yang merugikan individu lainnya mengharuskan individu yang kehilangan karena kesalahannya maupun kelalaian untuk mengganti kerusakan.
- b. Pelanggaran hukum ialah setiap tindakan yang mengganggu hak individu lainnya maupun tidak sejalan dengan peraturan yang seharusnya dijaga pada hidup sosial atas hidup individu maupun pribadi lainnya
- c. seseorang yang tidak dengan sengaja melaksanakan sebuah tindakan yang harus dilakukan disamakan dengan orang yang melaksanakan kejahatan yang dilarang karena melanggar ketetapan hukum.

Penaksiran Besar kerugian yang ditetapkan atas tindakan yang bertentangan dengan UU, diusahakan agar dapat memulihkan kondisi penderita semaksimal mungkin seperti kondisisebelum tindakan yang bertentangan dengan hukum dilakukan. Sebaliknya ganti rugi yang diharapkan umumnya telah ditentukan sebelumnya. Terkadang kesepakatan menetapkan bahwa pihak yang melaksanakan wanprestasi akan dijatuhi pembayaran paksaan sejumlah uang untuk setiap hari keterlambatan penjalanan kontrak, misalnya sebesar persentase nilai uang tertentu dari kesepakatan bersama²⁹

Apabila pengguna jasa telah menyebabkan keterlambatan pekerjaan kontraktor, keterlambatan penyerahan sebagian pekerjaan maupun keadaan lainnya yang ditentukan pada perjanjian sebagai penyebab ketidaktepatan yang tidak menjadi tanggung jawab kontraktor, kontraktor dapat menuntut perpanjangan waktu atau biaya pelaksanaan.³⁰ Terlepas dari apakah penundaan itu merugikan pengguna jasa, denda tetap akan dikenakan.³¹ Sebab dalam pelaksanaan suatu proyek kontraktor akan diminta untuk dapat menyelesaikan sebuah proyek dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan kualitas yang baik namun sesuai dengan upah yang terbatas.³²

²⁸ Tami Rusli, *Pengantar Ilmu Hukum*, Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2017, h.94.

²⁹ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia Suatu Tinjauan Perbandingan Hukum*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, h. 56.

³⁰ Seng Hansen, *Manajemen Kontrak Konstruksi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015, h, 114.

³¹ Nazarkhan Yasin, *Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, h. 112.

³² Muhammad Reza Aditya Ready, Sarwono Hardjomuljadi, "Analisis Pembagian Tanggung Jawab Pada Proyek Kerja Sama Operasi Terhadap Subkontraktor", *Jurnal Konstruksia* Vol. 10 No.2, 2019, h. 2.



Artikel ini menyimpulkan beberapa langkah yang seharusnya dilakukan oleh Penyedia Jasa untuk mengganti kerugian tersebut dengan pengajuan ganti rugi kepada Pengguna Jasa. Ganti rugi merupakan bentuk atau cara permohonan dan meminta penambahan waktu, kompensasi atau biaya yang lain di dalam suatu pekerjaan konstruksi. Pada kasus yang dialami di atas, maka akan membagi pengajuan ganti rugi kepada pengguna jasa antara lain:

a. Ganti Rugi Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Jangka waktu pelaksanaan proyek yang dijabarkan pada Kontrak Konstruksi antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa telah ditentukan dalam perjanjian Terminal Kijing, Namun akibat adanya aksi demonstrasi pada membuat seluruh kegiatan operasional pelaksanaan Pekerjaan berhenti. Hal ini dibuktikan dengan adanya pernyataan yang dibuat oleh masyarakat dan nelayan dan menghimbau Penyedia Jasa untuk berhenti melakukan aktivitas operasional pelaksanaan Pembangunan sampai ada kejelasan dari Pengguna Jasa untuk membayar ganti rugi pembebasan lahan. Atas kejadian tersebut, perwakilan dari Pengguna Jasa menyampaikan tuntutan masyarakat yang menghendaki kepastian pembayaran ganti rugi lahan tersebut.

Dengan adanya aksi demonstrasi warga sekitar yang menyebabkan aktivitas pelaksanaan Pekerjaan berhenti. menurut artikel ini bahwa Penyedia Jasa dapat melakukan pengajuan klaim kepada Pengguna Jasa atas kehilangan waktu pelaksanaan Pekerjaan akibat dari deminstrasi yang dilakukan warga. hal tersebut karena kesalahan yang dilakukan diakibatkan belum selesainya pembebasan lahan untuk pembangunan Terminal Kijing tersebut.

b. Ganti Rugi Tenaga Kerja dan Sewa Peralatan Pekerjaan

Dengan adanya pemberhentian pekerjaan, menyebabkan keraguan dari pihak penyedia jasa untuk melakukan pembayaran gaji kepada tenaga kerja, sedangkan pihak tenaga tidak melaksanakan kewajiban diakibatkan dengan penghentian pekerjaan. selain dari itu, berdampak kepada beberapa alat yang tidak berfungsi dengan baik, selain dari itu biaya sewa yang dilakukan pihak penyedia jasa tetap menjadi tanggung jawab penyedia jasa. permasalahan lain yang timbul, bahwa pembangunan terminal kijing diserahkan kepada sub kontraktor atau sub penyedia jasa. Dalam Pasal 1 ayat (6) UUKJ bahwa penyedia jasa merupakan pemberi jasa konstruksi, sehingga dalam pemenuhan kewajiban oleh penyedia jasa kepada sub penyedia jasa.

c. Ganti Rugi Biaya Pekerjaan

Akibat berhentinya seluruh kegiatan operasional dan aktivitas Pekerjaan sebagaimana dibahas sebelumnya, yang mengakibatkan potensi kerugian

secara waktu dan nilai oleh Penyedia Jasa. Hal tersebut mengakibatkan biaya Pekerjaan yang tidak sejalan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Biaya Pekerjaan merupakan jumlah biaya yang diperlukan dalam suatu pelaksanaan Pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh dan mengendalikan sumber daya yang dibutuhkan dari awal pelaksanaan hingga Pekerjaan tersebut selesai sesuai rencana.

Dilihat dari penjelasan di atas, bahwa timbulnya aksi demonstrasi ini disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jasa atas keterlambatan pembayaran ganti rugi dimana itu merupakan salah satu tanggung jawab Pengguna Jasa kepada warga sekitar. Maka dari itu Pengguna Jasa harus tetap mengganti kerugian yang dialami oleh Penyedia Jasa. Dengan begitu Pasal 1246 KUHPers menguatkan argumen tersebut bahwa kerugian yang diakibatkan oleh tidak terpenuhinya sebuah perjanjian yang seharusnya menggantikan kerugian yang didapatkan penderita serta perolehan profit yang diekspektasikannya.³³ Oleh karena itu dapat ditafsirkan bahwa pelaku yang melakukan perbuatan dengan melanggar hukum atau wanprestasi di haruskan untuk mengganti kerugian yang disebabkan, atau memperoleh keuntungan yang diharapkan.³⁴

Kewajiban Pengguna Jasa untuk mengganti kerugian yang dialami penyedia jasa dikuatkan lagi dalam penafsiran Pasal 1247 KUHPers bahwa debitur dalam hal ini adalah Pengguna Jasa wajib mengganti kerugian yang terjadi atas Kontrak Konstruksi yang dibuat. Maka dengan landasan pasal-pasal inilah penyedia jasa dapat menuntut ganti rugi kepada Pengguna Jasa atas berhentinya aktifitas pelaksanaan Pekerjaan.

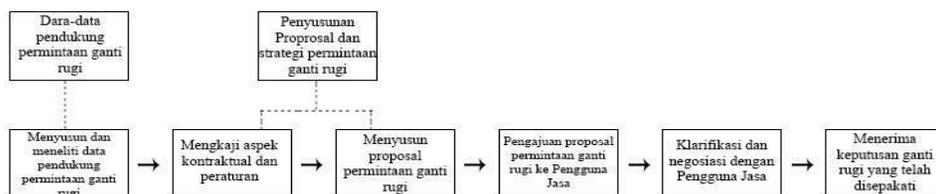
Apabila penyedia jasa ingin mengajukan ganti kerugian kepada pengguna jasa atas kerugian yang disebabkan oleh pengguna jasa, maka perlu memperhatikan beberapa tahapan, yakni:

- a. Keterangan mengenai kondisi kontrak seperti ruang lingkup pekerjaan, struktur pembiayaan untuk bagian pekerjaan yang relevan.
- b. Informasi tentang fakta-fakta kejadian yang dialami (maupun tidak dialami) umumnya dijabarkan secara berurutan serta terdiri dari korespondensi, perintah perubahan, rapat, dll.
- c. Akibat kondisi stimulus klaim, umumnya dijadikan cerita tentang peningkatan/peningkatan upaya yang diperlukan oleh penyedia jasa.
- d. Analisis biaya, yang dapat dimasukkan dalam kenaikan biaya yang ditimbulkan oleh perbandingan maupun perubahan antara dana aktual

³³ Togi Pangaribuan, "Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggung Jawaban Dalam Perjanjian Terkait Hak Menuntut Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi", *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 49 No. 2, 2019, h. 446.

³⁴ Rosa Agustina, Op.Cit., hlm 51-53.

dan perkiraan biaya, memberikan perbedaan antara keduanya dengan memperlihatkan total klaim.



Gambar 2. 1 Skema proses pengajuan ganti rugi.

Skema tersebut dapat diterapkan apabila Penyedia Jasa ingin mengajukan ganti rugi atas kerugian yang dialami, Pengajuan tersebut disertai dengan data pendukung ganti rugi yang telah disusun dan dipadukan dengan peraturan-peraturan yang ada, sehingga kerugian yang dialami oleh Penyedia Jasa akibat kelalaian Pengguna Jasa dalam pelaksanaan pekerjaan dapat dilaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kontrak Konstruksi dengan Pengguna Jasa.

KESIMPULAN

Penyedia Jasa dalam melaksanakan Pekerjaan mengalami hambatan yaitu demonstrasi yang dilakukan oleh warga sekitar demonstrasi terjadi akibat Pengguna Jasa terlambat melakukan pembayaran ganti rugi lahan terhadap warga sekitar. Terlambatnya pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa menandakan bahwa Pengguna Jasa belum melakukan prinsip itikad baik, yang dalam hal ini belum melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Kontrak Konstruksi. Dalam melakukan perjanjian, Pasal 1338 (3) KUHPerdara menyatakan bahwa Para Pihak dalam melaksanakan perjanjian harus dilandasi dengan penuh tanggung jawab. Tidak dilaksanakannya tanggung jawab oleh salah satu pihak dalam Perjanjian dapat berpengaruh kepada dideritanya kerugian bagi pihak lainnya.

Akibat terjadinya hambatan dalam pelaksanaan Pekerjaan karena terjadinya demonstrasi oleh warga sekitar menyebabkan pelaksanaan Kontrak Konstruksi menjadi terhambat. Dalam hal ini, Penyedia Jasa mengalami dampak langsung, yaitu tenaga kerja dan peralatan menjadi idle dan tidak bisa bekerja. Kondisi tersebut menyebabkan potensi keterlambatan dan kerugian bagi Penyedia Jasa, sehingga Penyedia Jasa berhak untuk mengupayakan pengajuan ganti kerugian kepada Pengguna Jasa dikarenakan Penyedia Jasa tidak dapat melaksanakan prestasi yang diatur dalam Kontrak Konstruksi oleh karena kelalaian Pengguna Jasa.

Penulisan ini memiliki kekurangan data yang diperlukan karena masa pandemi ini menghalangi pencarian data baik secara langsung ataupun secara primer dan penjelasan yang terlalu singkat mengenai Tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur terminal kijang pontianak, sehingga memerlukan penelitian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustina, Rosa, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia Suatu Tinjauan Perbandingan Hukum*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia)
- Djohansyah, J 2004. *Legal Justice, Social Justice dan Moral Justice Dalam Praktek*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Latihan Mahkamah Agung Republik Indonesia)
- Hansen, Seng, 2015, *Manajemen Kontrak Konstruksi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Khairandy, Ridwan, 2003, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta:Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
- Muhammad, Abdulkadir, 2000, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- P.F.P. Higgins,1970, *Elements of Torts in Australia*, (Sydney: Buttenvorths).
- Prodjodikoro,Wirjono, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum, Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, (Bandung: Mandar Maju).
- Rusli, Tami, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Lampung: Universitas Bandar Lampung).
- Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa).
- Yasin, Nazarkhan, 2003, *Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).

Jurnal

- Afifah Safira, Anan Chandrawulan, Pupung Faisal, 2021, "Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Selama Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum Doctrinal* Vol 6.No. 1, h.103-117.
- Andrew Timothy, I Wayan Wiryawan, Ni Putu Purwanti, 2017, "Pertanggungjawaban Hukum Bagi Penyedia Jasa Konstruksi Dan Pengguna Jasa Konstruksi Dalam Gagal Bangunan," *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 3 No. 2, Oktober, h.1-15.

- Barnabas Dumas Manery, 2017, “Makna Dan Fungsi Itikad Baik Dalam Kontrak Kerja Konstruksi”, *SASI* Vol. 23 No. 2, h. 136-148.
- Deviana Yuanitasari, Hazar Kusmayanti, 2020, “Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual”, *Acta diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* Vol. 3 No. 2, h. 292-304.
- Etika Christin Onibala Revo L.Inkiriwang, Mochtar Sibi, 2018, “Metode Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Dalam Proyek Pembangunan Sekolah SMK Santa Familia Kota Tomohon”, *Jurnal Sipil Statik* Vol. 6 No.11, h. 927-940.
- Filiberto J.D. Rengkung, 2017, “Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penyedia Barang Dan Jasa Dalam Pelaksanaan Jasa Konstruksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi”, *Jurnal Lex Crimen* Vol. 6 No. 9, h. 126-134.
- Fitri Yanni Dewi Siregar, Sunarmi, Mahmud Siregar, Detania Sukaraja, 2019, “Tanggung Jawab Penyedia Jasa Konstruksi Terkait Kegagalan Konstruksi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah”, *USU Law Jurnal* Vol. 7 No. 5, h. 46-55.
- Gita Anggreina Kamagi, 2018, “Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya”, *Lex Privatum* Vol. VI No. 5, h. 57-65.
- Muhammad Reza Aditya Ready, Sarwono Hardjomuljadi, 2019, "Analisis Pembagian Tanggung Jawab Pada Proyek Kerja Sama Operasi Terhadap Subkontraktor", *Jurnal Konstruksia* Vol. 10 No.2, h. 1-20.
- Novalia Arnita Simamora, Tan Kamello, Rosnidar Sembiring, Jelly Leviza, 2015, “Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Pendahuluan (voor overeenkomst) Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah”, *USU Law Journal* Vol. 3 No. 3, h. 84-96.
- Tamatopol Marviel Richard, 2017, “Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penyedia Jasa Dan Pengguna Jasa Konstruksi Menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi”, *Lex crimen* Vol. 6 No. 3, h. 37-45.
- Togi Pangaribuan, 2019, “Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggung Jawaban Dalam Perjanjian Terkait Hak Menuntut Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi”, *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 49 No. 2, h. 443-454.
- Yushar, 2019, “Tanggung Gugat Kontraktor dalam Kegagalan Bangunan”, *Media Iuris* Vol.2 No. 3, h.407-426.

Internet

Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup, 2017, *Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak*, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II, Pontianak.

Ray, 2018, "Proyek Terminal Kijing di Pelabuhan Pontianak Butuh Rp 14 T", *CNBC Indonesia*, July.

Hendra Cipta, 2019, "Ganti Rugi Pelindo II Tak Sesuai, Nelayan Korban Pembangunan Pelabuhan Kijing Geruduk Kantor Gubernur Kalbar", *Kompas.com*, Mei.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Lembaran Negara RI Nomor 6018.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat.

